



Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Potensi Pertanian Desa Di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

The Role Of The Village Government In Improving The Agricultural Potential Of Mampang Village, Kotapinang District, South Labuhanbatu Regency

Imelda Br Tarigan, Walid Musthafa Sembiring & Nina Angelia

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Mampang merupakan salah satu desa di Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Potensi yang dimiliki Desa Mampang adalah Kelapa sawit, Karet dan Padi. Namun pertanian di Desa Mampang belum mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa. Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan hasil pertanian Desa Mampang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran Soekanto Sulistyowati (2017:211), penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Penelitian ini terdiri dari informan utama, informan kunci dan informan tambahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa belum cukup baik dalam meningkatkan potensi dari pertanian desa, Peran Pemerintah Desa belum cukup baik dalam mengatasi faktor penghambat dari potensi pertanian desa di karenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan tidak adanya fasilitas dari pemerintah desa dalam meningkatkan potensi pertanian desa.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Potensi Pertanian Desa, Desa Mampang

Abstract

Mampang is one of the villages in Kotapinang, South Labuhanbatu Regency, North Sumatra which has considerable agricultural potential. The potential of Mampang Village is oil palm, rubber and rice. However, agriculture in Mampang Village has not progressed very rapidly. This is due to the lack of Human Resources and the lack of attention from the Village Government. Therefore, the authors conducted research on the role of the village government in increasing agricultural yields in Mampang Village. The theory used in this study is the role theory of Soekanto Sulistyowati (2017: 211), this study uses a qualitative descriptive method through interview, observation and documentation techniques. This study consisted of main informants, key informants and additional informants. The results of this study indicate that the role of the village government is not good enough in increasing the potential of village agriculture. increase the potential of rural agriculture.

Keywords: Role of Village Government, Village Agricultural Potential, Mampang Village

How to Cite: Imelda Br Tarigan, Walid Musthafa Sembiring & Nina Angelia (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Potensi Pertanian Desa di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 3(1) 2024: 43-51,

PENDAHULUAN

Desa mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan kenegaraan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat (Sitepu et al., 2019). Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa ini, masyarakat desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat untuk dilindungi, diberdayakan agar menjadi desa yang maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan di semua desa (Kadir & Lubis, 2019).

Kecamatan Kotapinang berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Kotapinang menempati area seluar 482,40 Km² yang terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan. Wilayah Kecamatan Kotapinang di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kampung rakyat, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Torgamba, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai kanan dan Torgamba dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Silangkitang. Dari 10 Desa/Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kotapinang, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Sisumut dengan luas 133,30 Km² dan yang terkecil adalah Desa Sosopan dengan luas 30,50 Km².

Pembangunan disektor pertanian di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik pertanian rakyat maupun pertanian yang dikelola oleh perusahaan (Maulana et al., 2022). Hal ini disebabkan oleh sumber daya alam yang memadai dan jumlah penduduk (tenaga kerja) yang bekerja disektor pertanian yang sangat banyak (Wiryadi et al., 2020). Kelapa sawit, Karet dan Padi merupakan salah satu komodasi perkebunan yang perannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya bagi penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Disamping itu kelapa sawit, Karet, dan Padi juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri (Permana & Nataliningsih, n.d.).

Keberadaan pertanian kelapa sawit, Karet dan Padi diharapkan dapat menambah penghasilan masyarakat sehingga penduduk mendapat penghasilan tambahan (Rafi'atul Hadawiya et al., 2021). Kondisi perekonomian di desa Mampang belum merata. Hal ini disebabkan distribusi pendapatan yang belum merata pula (Lubis et al., 2020). Distribusi dapat dimaknai sebagai perpindahan ataupun pembagian suatu barang atau jasa dari satu tempat ketempat lain (Mariska et al., 2021). Sedangkan kekayaan dapat dimaknai sebagai harta benda yang dimiliki seseorang baik dalam bentuk material maupun bentuk lainnya. Sehingga distribusi kekayaan dapat dimaknai sebagai bentuk perpindahan ataupun pembagian harta benda yang dimiliki seseorang kepada orang lain (Anggraini et al., 2023).

Pemerintah sebagai pelaksana utama dalam Negara mempunyai peran yang sangat penting demi berlangsungnya proses pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur dan pembangunan lainnya. Sebagaimana pemerintah dituntut untuk mampu menjadi penyelenggara Negara dalam mewujudkan perkembangan, kemajuan serta mampu menjadi faktor pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk melihat tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat dilihat dari tingkat pelayanan, pemerintahan kepada masyarakat itu sendiri (Kadri Pratiwi et al., 2021).

Peran Pemerintah Desa Mampang dalam meningkatkan potensi pertanian yang berada di Desa Mampang masih dikatakan belum cukup efisien, masih banyak kendala dan hambatan dalam meningkatkan potensi pertanian desa. Faktor penghambat dari potensi pertanian di Desa Mampang seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan tidak adanya fasilitas dari Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan yang terjadi (Iyoega, 2020). Peran Pemerintah sebagai koodinator merupakan tugas dalam mengoordinasi suatu kegiatan, dimana seharusnya Pemerintah Desa memberikan koordinasi kepada masyarakatan atau para petani tentang bagaimana cara mengelola hasil dari pertanian mereka dan bagaimana cara mengatasi kendala atau hambatan yang terjadi pada tanaman mereka (Saputra et al., 2022).

Peran Pemerintah Desa sebagai partisipan merupakan keikut serta Pemerintah Desa dalam suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah peningkatan potensi pertanian Desa Mampang. Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator yaitu Pemerintah sebagai fasilitas dalam memandirikan dan mensejahterakan masyarakat khususnya petani melalui usaha yakni usaha pertanian di bidang agribisnis. Hal ini membuat Pemerintah Desa bergerak untuk melakukan peningkatan potensi dari pertanian desa agar mendapat hasil yang memuaskan dan dengan kualitas yang baik (Dauwole et al., 2017).

Peran Pemerintah Desa diharapkan mampu memberikan peranan yang penting serta mampu memberi sumbangsi yang positif kepada masyarakat terutama masyarakat kelompok tani mengenai perkembangan potensi pertanian yang berada di desa, dengan harapan pemerintah mampu menjadi objek dalam memberikan fasilitas kepada para petani, mengedepankan perkembangan potensi pertanian (Iyoega, 2020).

Peran ialah tingkah laku yang didapatkan berdasarkan suatu jabatan tertentu. Manusia disetiap kehidupannya pastilah memiliki peran dan fungsi ketika ia menjalankan kehidupannya sebagai makhluk sosial (Anastacia et al., 2021). Manusia dalam menjalankan setiap perannya pastilah memiliki cara yang berbeda dari manusia lainnya yang tidak terlepas dari latarbelakang sosialnya. Ketika seorang manusia menjalankan hak dan juga kewajibannya dalam status dan kedudukannya, manusia tersebut sudah dapat dikatakan menjalankan suatu peran. (Soekanto Sulistyowati, 2017:210-211).

Orang-orang yang memiliki macam peran tergantung pada lingkup pergaulan dan juga lingkungan hidupnya, ia dapat menentukan setiap tindakan yang ingin diperbuatnya untuk masyarakat serta amanah dan juga kesempatan yang diberikan masyarakat untuknya. antara lain: 1) Peranan terdiri dari berbagai norma yang ditujukan pada posisi atau tempat orang tersebut di masyarakat; 2) Peranan merupakan suatu konsep yang digunakan oleh seseorang di masyarakat dalam organisasi; 3) Peranan disebut sebuah tindakan seseorang yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa Peran adalah tingkah laku seseorang yang memiliki tanggung jawab, dan harus diterapkan di lingkungannya untuk tujuan dan kemajuan bersama. Jika perilaku itu dilakukan untuk diri sendiri maka itu hanya untuk kepentingannya sendiri, namun jika peranan tersebut dijalankan dalam organisasi maka harus memiliki kepentingan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Kualitatif sendiri ialah salah satu penelitian yang dimaksudkan untuk meneliti tentang fenomena yang dialami oleh objek yang ingin diteliti seperti tingkah laku, pandangan dan juga dorongan atas tindakan dengan melakukan penggambaran dari objek tersebut dalam bentuk kalimat dalam bahasa yang sesuai dengan kondisi yang (Moeleng, 2006:6).

Dalam pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014:9).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah tidak terlepas dari bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan daya saing terhadap masyarakat (Nugraheni et al., 2021). Melihat yang terjadi pada saat ini bahwa masyarakat di era modren dengan begitu pesat dan berkembangnya ilmu teknologi dan komunikasi sehingga dapat mengindikasikan untuk semua masyarakat harus mampu mempersiapkan dirinya untuk terus mengembangkan potensinya yang kemudian tidak hanya bersumber dari kalangan masyarakat sekitar saja akan tetapi juga menjadi tugas pokok bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah sehingga mampu mengambil bagian yang strategis demi peningkatan porenasi desa.

Telah diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya bahwa dalam hal pengembangan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat maka pemerintah harus mampu menerapkan serta melaksanakan kegiatan melalui apresiasi, sosialisasi, fasilitas, pendampingan kelembagaan, dan pelatihan. Dengan demikian seharusnya pemerintah melakukan pembinaan kelembagaan kelompok petani secara berkesinambungan dan beorientasi pada pola pengembangan masyarakat, yang kemudian diarahkan pola pikir petani dalam menerapkan sistem pertanian baik pada kelompok pertanian, sehingga dengan adanya pembinaan dari pemerintah yang diharapkan mampu berperan aktif terhadap kelompok petani sehingga dapat memaksimalkan program pemerintah dalam pengembangan potensi pertanian yang berada di desa (Nasution et al., 2022).

Setiap daerah memiliki potensi, baik itu potensi alam hayati maupun potensi yang dimiliki setiap masyarakat (Oktavia & Prayetno, 2018). Potensi alam hayati yang berada di Desa Mampang

meliputi potensi pertanian desa, seperti potensi pertanian kelapa sawit, karet dan padi. Pertanian sangat penting bagi masyarakat Desa Mampang karena pertanian merupakan sumber penghasilan masyarakat desa mampang. Sementara itu, peranan dari pihak pemerintah dianggap sangat penting mengenai peningkatan potensi pertanian Desa Mampang terutama bagi masyarakat setempat.

Sebagai Kordinator dalam Penyelenggaraan

Pemerintah desa sebagai koordinator merupakan tugas dalam mengoordinasikan suatu kegiatan. Dalam hal ini pemerintah desa Mampang memberikan pengumuman terhadap masyarakat dengan memberikan pemberitahuan melalui setiap kepala dusun dan kemudian kepala dusun bekerja sama dengan rukun tetangga (RT) untuk memberitahukan kepada setiap warga desa untuk perkembangan dan peningkatan potensi pertanian desa Mampang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Isno Harmono Harahap.

“kami selaku pemerintah desa selalu senantiasa melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan potensi pertanian di desa mampang ini, makannya setiap tahun saya selalu melakukan kegiatan sosialisasi peningatan hasil pertanian saya juga biasanya melakuakan bersama perwakilan dari dinas pertanian” (Kantor Kepala Desa Mampang, 20 Januari 2022 pukul 10.10 wib).

Dari penjelasan di atas pemerintah desa memberikan pengarahan untuk dapat meningkatkan hasil dari potensi pertanian Desa Mampang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani :

“ada beberapa masalah yang dihadapi petani di Desa Mampang antara lain masalah hama dan banjir bagi petani padi, dan masalah harga jual yang tidak stabil dan pencurian bagi petani sawit dan karet. Bagi kami para petani padi, hama yang secara terus-terusan menyerang padi dapat menyebabkan menurunnya hasil panen. Selain hama yang menyerang tanaman para petani ada juga permasalahan lainnya yang dihadapi oleh para petani di Desa Mampang yaitu saluran irigasi yang kurang memadai mengakibatkan lahan pertanian kekurangan air pada musim kemarau sehingga dapat menyebabkan gagal panen atau paling tidak penurunan kualitas dari hasil panen”. (Desa Mampang, 21 Januari 2022 pukul 09.00 wib)

Berdasarkan penjelasan di atas pemerintah desa telah memberikan pengarahan dalam mensosialisai tentang bagaimana cara meningkatkan hasil dari potensi pertanian di desa mampang kepada para petani. Peran Pemerintah Desa Mampang dalam meningkatkan hasil dari pertanian desa ialah memberikan penyuluhan kepada para petani dengan dinas pertanian yang dilakukan 3 kali dalam setahun. Namun nyatanya para petani hanya mendapatkan penyuluhan tentang pertanian dari Pemerintah Desa dan Dinas Pertanian hanya 1 kali dalam setahun.

Sebagai Partisipan dalam Pelaksanaan

Pemerintah sebagai partisipan ini maksudnya yang ikut berperan dalam suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah peningkatan Potensi Pertanian Desa Mampang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Isno Harmono Harahap.

“dalam bentuk partisipasi yang kami lakukan itu selalu ikut mengawasi dan mengontrol kegiatan pertanian setiap masyarakat, kami selalu melakukan kunjungan untuk para petani dan melihat apakah yang sudah kami sosialisasikan berjalan dengan lancar atau tidak” (Kantor Kepala Desa Mampang, 20 Januari 2022 pukul 10.10 wib).

Dari keterangan diatas yang disampaikan oleh Bapak Isno di kantor Kepala Desa Mampang, dari sudut pandangan peneliti melihat bahwa Pemerintah desa dalam hal ini masih memperdulikan dan ikut adil dalam meningkatkan potensi pertanian desa. Peran Pemerintah Desa Mampang sebagai partisipan dalam pelaksana yaitu Pemerintah Desa sudah ikut adil seperti membantu petani padi dalam pencucian irigasi aliran air pada tanaman padi, serta melakukan kunjungan terhadap petani karet dan sawit untuk menanyakan tentang permasalahan atau hambatan yang sering terjadi kepada para petani.

Sementara itu, dari hasil wawancara peneliti melihat ada beberapa hal yang pemerintah desa tidak laksanakan dalam meningkatkan potensi pertanian desa, diantaranya sebagai berikut :

Tidak ada kebijakan khusus

Kebijakan merupakan suatu kumpulan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, tujuan dalam meningkatkan potensi pertanian desa.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Sugianto dan Bapak Andi selaku petani padi :

“kalau dalam meningkatkan potensi pertanian desa, apalagi desa mampang ini memiliki area persawahan yang luas. Seharusnya kami mendapatkan seperti alat penggilingan gabah yang akan

menjadi beras agar nilai jual yang kami dapat pun semakin tinggi, jadi dari desa mampang akan terkenal dengan kualitas beras yang dimiliki” (Desa Mampang, 20 Januari 2022 pukul 09.00 wib).

“memang betul seperti yang dikatakan Bapak Sugianto yang belum ada itu seperti alat penggilingan padi, jadi kami susah harus menunggu mereka datang dulu baru bisa menggiling gabah-gabah ini. Kadang dari hari yang kami sudah panen, dua hari kemudian baru mereka datang untuk menggiling gabah kami menjadi beras” (Desa Mampang, 10 April 2022 Pukul 15.00 wib).

Hasil wawancara dengan Bapak Jubir Harahap selaku petani karet :

“kalau dari karet sendiri itu paling kendalanya cuman di akses jalan saja, kadang mobil pengangkut karet itu susah buat masuk ke area perkebunan apa lagi disaat musim hujan seperti ini, jalanan menjadi becek dan licin sehingga upah biaya angkut hasil pertanian menjadi mahal” (Desa Mampang, 21 Januari 2022 pukul 11.00 wib).

Hasil wawancara dengan Bapak Supriadi dan Bapak Boni Siregar selaku petani kelapa sawit :

“Dari kelapa sawit itu yang sering terjadi kendala itu harga sawit yang tidak tetap kadang mahal kadang murah, karna harga sawit sempat mahal dan sekarang harganya sudah normal kembali dan juga sering terjadi pencurian buah sawit disini. Apalagi pas harga sawit mulai mahal, jadi pencurian banyak terjadi” (Desa Mampang, 25 Januari 2022 pukul 10.00 wib)

“kalau sawit ini kendalanya kalau pas buah sawit lagi mahal, jadi buahnya sering tidak ada, buah tidak ada itu maksudnya pas buah sawit lagi mahal buah sawit yang kita tanam ini selalu tidak ada tidak berbuah, setelah berbuah kita keduluan sama pencuri” (Desa Mampang, 10 April 2022 Pukul 11.00 wib).

Dari informasi yang didapatkan selama dilapangan, dalam hal ini Pemerintah desa seharusnya bisa lebih memberikan kebijakan khusus mengenai permasalahan yang terjadi pada para petani. Seperti pada petani padi yang menginginkan adanya penggilingan yang mereka miliki sehingga mereka dapat menjual hasil pertanian mereka dengan harga jual yang mahal dengan kualitas yang terbaik. Sedangkan untuk petani karet seharusnya pemerintah desa membuat anggaran mengenai perbaikan jalan, agar para petani semakin muda untuk mengakses pertanian mereka dan harga angkut hasil panen tidak lagi tinggi. Dan untuk petani sawit, seharusnya pemerintah desa membuat sebuah kebijakan baik itu kebijakan sosial maupun kebijakan hukum tentang pencurian sehingga masyarakat yang memiliki pertanian sawit merasa aman.

Tidak ada penyediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang hasil pertanian. Hasil wawancara bersama para petani “kalau di desa mampang biasanya hasil pertanian itu diangkut sama mobil pengangkut yang biaya angkutnya ditanggung sendiri oleh masyarakat” dengan demikian pemerintah desa seharusnya juga memberikan perhatian khusus dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator (Dukungan)

Pemerintah desa berperan dalam memandirikan dan mensejahterakan masyarakat khususnya petani melalui suatu usaha yakni usaha pertanian di bidang agribisnis. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang peran pemerintah desa sebagai fasilitator melalui program-program desa. Peran pemerintah desa mampang dalam hal ini diketahui bahwa pemerintah desa melakukan pendampingan dan memberikan fasilitas. Dalam hal ini pendampingan, pemerintah desa ikut mendampingi dalam pembentukan kelompok tani dan juga sosialisasi terkait pertanian. Untuk fasilitas sendiri, pihak pemerintah desa membangun fasilitas sumur bor dan revitalisasi saluran irigasi di sawah agar sawah dapat teraliri air dengan baik. Selain itu pemerintah desa juga sedang berencana mengadakan program bibit bersubsidi hingga bibit gratis melalui pengajuan proposal desa menganggarkan dana untuk melakukan penyuluhan kepada para petani mengenai pemberantasan hama maupun pengenalan teknologi tepat guna agar hasil produktivitas lahan pertanian juga lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Isno Harmono Harahap.

“kami sebagai pemeritah menyediakan fasilitas yang diinginkan oleh parah petani, kami terlebih dahulu mendengarkan keinginan mereka dan kemudian kami akan memfasilitasi semuanya” (Kantor Kepala Desa Mampang, 20 Januari 2022 pukul 10.10 wib).

Dari keterangan diatas yang disampaikan oleh Bapak Isno di kantor Kepala Desa Mampang, dari sudut pandangan peneliti melihat bahwa Pemerintah desa dalam hal ini masih memperdulikan dan ikut adil dalam memfasilitasi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh para petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani :

“kami para petani masih belum banyak mendapatkan fasilitas yang kami inginkan dari pemerintah, seperti alat penggilingan padi yang kami inginkan agar kami dapat menjual hasil tanaman padi dalam bentuk beras dan dengan nilai jual yang tinggi. Pada petani karet, saya juga mengharapkan adanya perbaikan jalan untuk kami dalam mengangkut hasil panen tanaman karet” (Desa Mampang, 21 Januari 2022 pukul 11.00 wib).

Dari informasi yang didapatkan selama dilapangan, dalam hal ini Pemerintah desa seharusnya bisa lebih memberikan fasilitas mengenai permasalahan yang terjadi pada para petani. Seperti pada petani padi yang menginginkan adanya penggilingan yang mereka miliki sehingga mereka dapat menjual hasil pertanian mereka dengan harga jual yang mahal dengan kualitas yang terbaik. Sedangkan untuk petani karet seharusnya pemerintah desa dapat memperbaiki jalan yang mereka gunakan dalam mengangkut hasil panen tanaman mereka.

Faktor Penghambat dari Potensi Pertanian Desa

Faktor internal

Tanaman Padi

Faktor internal yang menjadi penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan sikap individu dengan kurangnya kesadaran diri sendiri. Maksudnya beberapa petani terkadang masih mementingkan diri sendiri. Dulu para petani menanam padi dengan serentak tetapi sekarang mana yang lebih menguntungkan itu yang ditanam sehingga tanaman di sawah tidak teratur. Dan hama pada setiap tanaman itu berbeda-beda, jika salah satu di basmi maka akan datang yang lain.

Hal ini di sampaikan langsung dengan Bapak Sugianto dalam wawancaranya :

“kalau faktor yang penghambat dari tanaman padi ini yaitu tadi kami kekurangan sumber tenaga atau sumber daya manusia yah, nah jadikan ini masih banyak lahan kosong yang dikasih dari pemerintah desa, tetapi banyak masyarakat yang kurang berminat dalam menanam padi. Dan satu lagi paling yah masalah hamala. Hama ini berbeda-beda jenis dan kalau udah satu disemprot pasti akan timbul hama yang jenis lain lagi” (Desa Mampang, 20 Januari 2022 pukul 09.00 wib).

Hal ini di sampaikan langsung oleh Bapak Andi dalam wawancaranya :

“kalau dari tanaman padi yang menjadi kendala itu kita ini punya lahan persawahan yang lebar nah ada juga disebalah sana yang dibawah jembatan itu juga lahan persawahan punya desa kita. Yah tapi itu gak ada minat masyarakat untuk mengelolanya, masyarakat kurang berminat dalam menanam padi” (Desa Mampang, 10 April 2022 Pukul 15.00 wib).

Tanaman Karet

Faktor internal yang menjadi penghambat tanaman karet yaitu hama yang sering dijumpai di pembibitan. Janis hama yang sering dijumpai yaitu tungau (mites) dan rayap yang mengganggu pertumbuhan tunas atau pucuk yang baru tumbuh.

Hal ini disampaikan langsung dengan Bapak Jubir Harahap dalam wawancaranya :

“kalau karet paling faktor yang menjadi penghambatnya yaitula hama tadi. Biasanya hama paling sering muncul itu waktu penanaman dan pertumbuhan di bagian tunaslah hama sering mengganggu. Tunas itu bagian atas atau pucuk tanaman karet yang baru mau tumbuh” (Desa Mampang, 21 Januari 2022 Pukul 11.00 wib).

Tanaman Sawit

Faktor internal yang menjadi penghambat tanaman sawit yaitu hama dan penyakit tanaman kelapa sawit. Penyakit yang sering timbul pada tanaman sawit yaitu penyakit busuk pada pucuk kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur *phytophthora palmivora*. Dan hama yang sering mengganggu tanaman sawit yaitu tungau, ulat setora, dan kumbang.

Hal ini di sampaikan langsung oleh Bapak Supriadi dalam wawancaranya :

“kalau yang menjadi faktor penghambat yah dari kelapa sawit yah paling hamala. Dan kalau di kelapa sawit itu jenis hamanya seperti tungau, kumbang-kumbang dan paling ulat yang memakani buahnya. Trus kalau yang lain itu seperti ini dia sering terjadi pembusukan pada bagian pucuk kelapa sawit” (Desa Mampang, 25 Januari 2022 Pukul 10.00 wib)

Hal ini juga di sampaikan langsung oleh Bapak Boni Siregar dalam wawancaranya :

“menanam sawit ini susah-susah gampang dia, kalau yang menjadi penghambat di sawit itu paling hama yang menyerang pohon dan buah sawit, terus sama kalau kita salah pemupukan kadang buahnya sawitnya rusak dan gak bagus harga jual juga semakin murah” (Desa Mampang, 10 April 2022 Pukul 11.00 wib).

Faktor Eksternal

Tanaman Padi

Faktor eksternal yang menjadi penghambat pada tanaman padi yaitu belum adanya mesin penggilingan padi yang dimiliki oleh desa mampang. Para petani padi bisa menghasilkan 4 ton padi dalam sekali panen, namun mereka masih menjual padi dalam bentuk gabah. Hal ini yang membuat kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pertanian padi.

Hal ini di sampaikan langsung oleh Bapak Sugianto dalam wawancaranya:

“kalau kendala dari luar, itu paling inilah tidak adanya mesin penggilingan padi di desa mampang ini. Padahal dari semua desa, cuman desa mampang ini yang punya area persawahankan. kalau adanya alat penggilingan kalau kita jual dalam bentuk beras dengan merek sendiri kan pasti harganya mahal, trus masyarakat juga pasti banyak yang mau bersawah nanam padi” (Desa Mampang, 20 Januari 2022 Pukul 09.00 wib).

Hal ini juga di sampaikan langsung oleh Bapak Andi dalam wawancaranya :

“kalau kendala yang dari luar mungkin itu tadi, tidak ada alat penggilingan padi. Maunyakn kalau ada alat itu kita bisa memproduksi beras dari desa mampang sendiri, dan masyarakat juga lebih banyak yang mau bertani padi” (Desa Mampang, 10 April 2022 Pukul 15.00 wib).

Tanaman Karet

Faktor eksternal yang menjadi penghambat pada tanaman karet yaitu kurangnya perhatian sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Desa. Seperti prasarana jalanan yang harus pemerintah desa lebih perhatikan, karena jika prasarana jalan sudah lebih baik maka kegiatan jual beli karet menjadi lebih mudah dan harga upah dalam sekali angkut tidak lagi mahal.

Hal ini di sampaikan langsung oleh Bapak Jubir Harahab dalam wawancaranya :

“kalau faktor kendala dari luar, kalau tentang persoalan karet yah paling kami kendalanya cuman di jalan ini ajalah, kalau masalah harga jual karet si gak ada soalnya karet dari dulu segini segini aja 4.300/kg gak naik gak turun juga. Cuman yah inilah karna jalan di desa mampang ini belum bagus kan apa lagi kalau sudah hujan, maka harga upah angkut hasil panen ini jadi mahal” (Desa Mampang, 21 Januari 2022 Pukul 11.00 wib)

Tanaman Sawit.

Faktor eksternal yang menjadi penghambat dari potensi pertanian kelapa sawit yaitu kurangnya kebijakan dari pemerintah desa. Seperti diketahui bahwa sering terjadi pencurian kelapa sawit di desa mampang, namun masyarakat belum menerima respon atau tanggapan dari pemerintah desa mengenai kebijakan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hal ini di sampaikan langsung oleh Bapak Supriadi dalam wawancaranya :

“faktor dari luar kendala tentang sawit, tentang seringnya terjadi pencurian sama masalah jalanan ini. Kalau soal pencurian kami sudah beberapa kami melapor ke kantor desa, tapi dari kantor katanya nanti mau diusulkan apalah gitu tentang bagaimana caranya mengatasi hal itu, tapi sampai sekarang belum ada juga kebijakannya dari kantor desa” (Desa Mampang, 25 Januari 2022 Pukul 10.00 wib).

Hal ini juga di sampaikan langsung oleh Bapak Boni Siregar dalam wawancaranya :

“kalau itu tentang pencurian buah sawit yang paling sering terjadi, kami juga masih menunggu kebijakan yang dibuat oleh kepala desa. Dan juga kemarin sudah ada tanggapan dari pihak kepolisian, mereka sudah mendapatkan laporan dari kepala desa dan akan segerah diselesaikan permasalahannya” (Desa Mampang, 10 April 2022 Pukul 11.00 wib).

Dari teori peran menurut Soekanto Sulistyowati (2017;211) apabila dikaitkan dengan faktor Internal tersebut yaitu sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya kesadaran diri sendiri tentang pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Sedangkan dari faktor Eksternal yaitu tidak adanya mesin penggilingan pada petani padi, akses jalan yang rusak pada petani karet dan seringnta terjadi pencurian buah sawit pada petani sawit. Jadi dari teori tersebut peran itu harus di implementasikan apabila keberlangsungan dari masyarakat tersebut hendak dipertahankan, agar struktur di masyarakat tersebut lebih efektif dan sistematis.

Peran pemerintah desa sangat penting dalam meningkatkan potensi pertanian desa mampang. Peran tersebut didasari kepada pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya meningkatkan potensi pertanian desa yang merupakan sebagai sumber penghasilan dari masyarakat desa mampang. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan peningatan potensi pertanian desa, karena tanpa adanya keikutsertaan maka tidak akan ada peningkatan dalam pertanian desa mampang.

SIMPULAN

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan Potensi Pertanian di Desa Mampang berdasarkan teori peranan Soekanto Soelistyowati sudah ikut adil dalam pelaksanaannya, namun masih banyak memiliki kekurangan. Peran Pemerintah sebagai koordinator, partisipan dan fasilitator dianggap belum cukup baik dalam peningkatan potensi pertanian desa mampang. Beberapa program pemerintah yang dibuat untuk meningkatkan potensi pertanian belum berjalan sempurna. Seharusnya pemerintah juga harus mengedepankan dan melibatkan banyak pihak, seperti dinas pertanian dalam meningkatkan potensi dari pertanian desa mampang. Dengan memberikan sosialisasi bersama dinas pertanian dapat memberikan masyarakat wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan hasil dari pertanian mereka dan bagaimana cara mengatasi hama yang menyerang tanaman mereka.

Peran pemerintah desa dalam mengatasi faktor pengambat dari Potensi Pertanian di Desa Mampang masih dikatakan belum cukup baik, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui jenis pupuk seperti apa yang dapat meningkatkan kualitas dari hasil tanaman mereka. Dan masyarakat di desa mampang juga belum mengetahui racun hama seperti apa yang dapat mengatasi penyerangan hama yang mengganggu dan merusak tanaman mereka. Serta butuhnya perhatian khusus dalam pembangunan akses jalan secara merata di Desa Mampang, untuk memudahkan para petani dalam menjual hasil tanaman mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soejono, Sulistyowati & Budi. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*.
- Achmadi, Abu, & Narbuko. (2013). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miftah, & Toha. (2007). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Moleong, J, & Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Chozin, M.A. dkk. (2010). *Pembangunan Perdesaan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: IPB Press
- Andrianus Sodi Liwu., Dkk. (2019). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 8 No. 4, ISSN 2442-6962.
- Donggulo V. Candra., Dkk. (2017). *Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi (Oryza satiuum L) Pada Berbagai Pola Jajar Legowo dan Jarak Tanam*. *Jurnal Ilmu Pertanian*. Vol 1 No.24, ISSN 0854-641X.
- Fauzi., Dkk. (2015). *Potensi dan Strategi Pengembangan Pertanian Pada Kelompok Tani Sumber Klopo 1*. *Jurnal Ilmu Pertanian*. Vol 2 No.3.
- Gustiana., Dkk. (2015). *Strategi Pembangunan Pertanian dan Perekonomian Pedesaan Melalui Kemitraan Usaha Berwawasan Agribisnis*. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Agribisnis*. Vol 3 No.4.
- Jui Rompas., Dkk. (2015). *Potensi Sektor Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Karya Ilmiah*.
- Karbulah., Dkk (2018). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol 3 No. 1.
- Liwu Sodi Adrianus, Dkk (2019). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani*. Vol. 8 No. 4 ISSN. 2442-6962
- Mochlisin Andriyanto., Dkk. (2001). *Produksi Tanaman Karet (Havea Breasiliensi) Pada Waktu Pengumpulan Lateksi Yang Berbeda*. *Jurnal Agro Estate VII (3) : 27-34*.
- Sugiman (2018). *Pemerintahan Desa*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 7 No.1
- Prawotno., Dkk. (2010). *Pengembangan Potensi Unggulan Sektor Pertanian*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Prasetyo Indra (2019). *Kinerja Perangkat Desa Dalam Menjalankan dan Wewenang Sesuai UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*. Vol 4 No.3 ISSN 2612-2142.
- Prayetno Gunawan., Dkk. (2020). *Pemetaan Potensi Pertanian Desa Brokal Kecamatan Pagelaran Berbasis Partisipatif*. *Jurnal Ilmu Pertanian*. Vol 1 No.2.
- Listiawati, L. W. (2020, Mei). *Pengembangan Potensi Lokal Pertanian Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat*.
- Mayasari, T. (2021). *Peran Pemerintahan Desa Dan Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Atib Ko Ambai Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kabupaten Rokan Hilir Riau*.
- Salma. (2017, April). *Peranan Hasil Pertanian Kelapa Sawit Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Persepektif Ekonomi Islam Di Desa Karossa Kecamatan Karossa Mamuju Tengah*.
- Anastacia, D., Nasution, L., & Suharyanto, A. (2021). *Peranan Motivasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berbasis Kebutuhan The Role of Motivation in Improving Employee Performance Based on Requirements*. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(September), 176-184. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.748>

- Anggraini, V. D., Hartono, B., & Budiani, I. T. (2023). Kinerja Birokrasi Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1844–1857. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1434>
- Dauwole, E., Kaawoan, J., & Sendow, Y. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan. *PERSPEKTIF*, 2(2), 1–11.
- Iyoega, R. R. (2020). Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung. *Perspektif*, 9(1), 55–65. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864>
- Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Implementation of Assistance for Livable Houses for Underprivileged Communities in Bagan Sinembah Subdistrict, Rok. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 174–183.
- Kadri Pratiwi, A., Masitho Batubara, B., & Nasution, I. (2021). Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Medan The Role Of The Cleaning And Gardening Services In The Management Of A Green Open Space In Medan City. *Oktober*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.773>
- Lubis, K., Kadir, A., & Harahap, D. (2020). *Implementasi Peraturan Gubernur Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Implementation of the Governor's Regulation Concerning Additional Income All.* 2(2), 178–189. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/tabularasa>
- Mariska, R., Kusmanto, H., & Fadli, F. (2021). Analisis Distribusi Logistik pada Pemilu 2019 di Kota Medan. *Perspektif*, 10(1), 110–119. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4143>
- Maulana, R. A., Warsono, H., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Urban Farming: Program Pemanfaatan Lingkungan Untuk Pengembangan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. *Perspektif*, 11(4), 1329–1335. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6302>
- Nasution, J., Susilo, F., Rahmiati, & Suharyanto, A. (2022). Pemanfaatan Limbah Kelapa (Cocos Nucifera) dalam Pembuatan Briket Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Kelambir Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Pelita Masyarakat*, 3(2), 99–106. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v3i2.6459>
- Nugraheni, R. Y., Priyadi, B. P., & Kismartini, K. (2021). Inovasi Pelayanan Pertanahan Pengecekan Sertifikat online. *Perspektif*, 10(1), 47–56. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4017>
- Oktavia, M., & Prayetno, P. (2018). Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), 81–92. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.12>
- Permana, R., & Nataliningsih, N. S. P. (n.d.). *ANALISIS EFISIENSI USAHA AGROINDUSTRI GULA AREN (Arenga Pinnata)(Suatu Kasus di Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang)*.
- Rafi'atul Hadawiya, Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Saputra, R. E., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2022). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah The Role Of The Village.* 4(2), 157–163. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i2.1438>
- Sitepu, Y. A., Kadir, A., & Dewi, R. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 54–61.
- Wiryadi, R., Sihombing, M., & Isnaini, I. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan dalam Pencatatan AK 1 dalam Memberikan Kepuasan kepada Masyarakat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 48–58. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i1.42>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pemerintahan desa.

Undang-undang No 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu selatan.

Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2015 Tentang Desa.

Peraturan Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa